

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN NO. 02 TENTANG LAPORAN
REALISASI ANGGARAN (STUDI KASUS PADA
DISKOMINFO KALBAR)**

TUGAS AKHIR

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana**



**FITRI RAHMA ANGGRAINI
B1031211035**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025**

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Fitri Rahma Anggraini

Nim : B1031211035

Jurusan : Akuntansi

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Artikel : Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran
(Studi Kasus Pada Diskominfo Kalbar)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulisan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya

Pontianak, 19 November 2024



Fitri Rahma Anggraini

NIM. B1031211035

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fitri Rahma Anggraini
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Ujian	: 20 Desember 2024
Judul Skripsi	: Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Diskominfo Kalbar)

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber data dan informasi baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 19 November 2024



Fitri Rahma Anggraini

NIM. B1031211040

LEMBAR YURIDIS

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NO. 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN (STUDI KASUS PADA DISKOMINFO KALBAR)

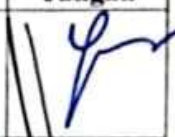
Penanggung Jawab Yuridis



Fitri Rahma Anggraini
B1031211035

Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif	: 20 Desember 2024

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
1.	Ketua Penguji	Dr. Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA.		
		NIP. 197906182002122003		
2.	Sekretaris Penguji	Angga Permadi Karpriana, S.E., M.Acc., Ak.	09/01/2025	
		NIP. 198611292014041001		
3.	Penguji 1	Dr. Haryono, S.E., M.Si., Ak.	08/01/2025	
		NIP. 196306301990021001		
4.	Penguji 2	Ayu Puspita Sari, S.Ak., M.Ak.	06/01/2025	
		NIP. 199603052022032007		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak, 23 JAN 2025
Koordinator Program Studi Akuntansi



Dr. Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197906182002122003

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan Syukur kepada Allah SWT. Atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Diskominfo Kalbar)”** dapat diselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Dalam penyusunan tugas akhir ini tentunya tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan, motivasi, semangat, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus dan ikhlas penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Barkah, S.E., Msi. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
4. Bapak Vitriyan Espa, S.E., MSA., Ak, C.A. Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
5. Ibu Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak. Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dan Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Haryono, S.E., M.Si., Ak. Selaku Dosen Pembimbing Riset yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Angga Permadi Karpriana, S.E., M.Acc., Ak. dan Ayu Puspita Sari, S.Ak., M.Ak. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukannya selama ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen khususnya jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis sejak awal perkuliahan berlangsung hingga saat ini.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pelayanannya.
10. Kepada pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian dan memperoleh data.
11. Kepada diri sendiri yang sangat membanggakan yang senantiasa berjuang dan berusaha semaksimal mungkin.
12. Kepada kedua orangtua yang sangat penulis cintai, Bapak Hadiman Nur dan Ibu Nurhayati yang selalu memberikan dukungan yang sangat luar biasa, selalu mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, memberikan doa baik yang tiada hentinya, dan memberikan kasih sayang yang sangat berlimpah sehingga menjadi kekuatan yang sangat berarti bagi

penulis.

13. Kepada saudara Kandung, Yuni Apriani, M. Dimas Saputra, dan Arsyila Hanum Febriani yang memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa dan sangat berarti bagi penulis.
14. Kepada teman-teman yang menemani untuk bertumbuh dan berkembang kearah yang lebih baik, Septiana Fernanda, Dhea Putri Pratama, dan Finalianti Roskaputri yang selalu memberikan dukungan dan menjadi teman terbaik, dan senantiasa menemani penulis selama masa perkuliahan.
15. Teman-teman kelas Akuntansi A dan teman-teman angkatan 2021 yang senantiasa memberikan kenangan di masa kuliah ini.
16. Teman-teman organisasi *Tax Center Community* (TCC) tempat penulis mendapatkan pengalaman berharga yang senantiasa memberikan dukungan.
17. Berbagai pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca guna peningkatan pembuatan tugas akhir pada waktu mendatang. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta diberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, Amin.

Pontianak, 09 Januari 2024



Fitri Rahma Anggraini
NIM. B1031211035

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN NO. 02 TENTANG LAPORAN REALISASI
ANGGARAN (STUDI KASUS PADA DISKOMINFO KALBAR)**

Oleh:

Fitri Rahma Anggraini

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyusunan LRA yang dilakukan oleh Diskominfo Kalbar serta penerapan PSAP No. 02 dalam PP No. 71 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada pejabat terkait dan analisis dokumen, penelitian ini mengidentifikasi proses penyusunan LRA, pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan serta belanja, serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo Kalbar telah menjalankan prosedur penyusunan LRA dengan baik. PSAP No. 02 dalam PP No. 71 Tahun 2010 telah diterapkan secara penuh dan telah dilakukan secara konsisten, dengan LRA mencakup semua komponen yang diperlukan dan pengakuan serta pengukuran pendapatan dan belanja dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Diskominfo Kalbar juga menunjukkan komitmen terhadap transparansi dengan memastikan bahwa LRA mereka mudah diakses oleh masyarakat dan pihak berkepentingan. Meskipun demikian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyusunan LRA, termasuk peningkatan sistem monitoring dan evaluasi, pelatihan karyawan, dan peningkatan kolaborasi internal. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, Diskominfo Kalbar dapat terus meningkatkan kualitas dan transparansi dalam penyusunan LRA serta memastikan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), PP 71 Tahun 2010, PSAP No 02, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NO. 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN (STUDI KASUS PADA DISKOMINFO KALBAR)

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Good public governance mendorong pemerintah melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui kebijakan akuntansi seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menggunakan basis akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010. SAP bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan pertanggungjawaban.

Laporan keuangan pemerintah meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, dan lainnya, disusun berdasarkan PSAP. LRA adalah dokumen penting yang menggambarkan realisasi anggaran, meliputi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan. Informasi ini digunakan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, sebagai bagian dari pemerintah provinsi, juga menyusun laporan keuangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PSAP No. 02 pada LRA yang disusun Dinas tersebut, untuk menilai kesesuaian dengan standar yang berlaku.

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan PSAP No.02 tentang laporan realisasi anggaran.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang relevan terkait topik penelitian Teknik Pengumpulan Data dilakukan dalam tiga tahapan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

4. Hasil Penelitian

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Diskominfo Kalbar) menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan PSAP No. 02 dengan basis akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Setiap transaksi, baik pendapatan maupun belanja, dicatat oleh bidang-bidang terkait dan diverifikasi secara ketat menggunakan aplikasi SIMAKDA untuk memastikan akurasi data.

LRA Diskominfo Kalbar mencakup komponen penting seperti pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan sisa. Pendapatan diakui saat diterima di rekening kas daerah, sementara belanja diakui saat terjadi pengeluaran yang didukung dokumen sah. Seluruh transaksi dicatat dalam rupiah sesuai prinsip akuntansi.

Kendala pencatatan, seperti selisih kapitalisasi, ditangani segera oleh bagian akuntansi. Proses penyusunan dilakukan secara efektif dan efisien, mencerminkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang baik. LRA tidak hanya sebagai alat evaluasi kinerja penggunaan sumber daya ekonomi, tetapi juga memastikan penggunaan anggaran sesuai rencana dan hukum yang berlaku.

5. Kesimpulan dan Saran

Diskominfo Kalbar telah menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai PAP No. 02 dan PP No. 71 Tahun 2010. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mencakup komponen pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan sisa, dengan pengakuan dan pencatatan transaksi menggunakan basis kas dan mata uang rupiah. Diskominfo Kalbar juga berkomitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dengan memastikan LRA mudah diakses masyarakat. Kendala kecil seperti selisih pencatatan angka kapitalisasi ditangani segera tanpa menghambat proses penyusunan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyusunan LRA, termasuk peningkatan sistem monitoring dan evaluasi, pelatihan karyawan, dan peningkatan kolaborasi internal. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, Diskominfo Kalbar dapat terus meningkatkan kualitas dan transparansi dalam penyusunan LRA serta memastikan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT	i
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR YURIDIS	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vi
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kontribusi Penelitian.....	4
1.4.1 Kontribusi Teoritis	4
1.4.2 Kontribusi Praktis	5
1.5 Gambaran Konstektual Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik	7
2.1.2 Pengertian dan Fungsi Anggaran Sektor Publik	8
2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah.....	8
2.1.4 Komponen-Komponen Laporan Keuangan Pemerintah.....	9
2.1.5 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran	10
2.2 Kajian Empiris.....	11
2.3 Kerangka Konseptual	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Bentuk Penelitian	18
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	19
3.3 Data	19
3.4 Populasi dan Sampel	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	20

4.1	Hasil Penelitian	20
4.1.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	20
4.1.2	Hasil Wawancara	20
4.1.2.1	Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.....	23
4.1.2.2	Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Pendapatan LRA	26
4.1.2.3	Pengakuan dan Pengukuran Belanja LRA	27
4.1.2.4	Penerapan PSAP No.02 PP 71 Tahun 2010 di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	28
4.2	Pembahasan Penelitian	29
BAB V	PENUTUP.....	31
5.1	Simpulan.....	31
5.2	Keterbatasan Penelitian	31
5.3	Rekomendasi	32
5.4	Implikasi Penelitian.....	32
	DAFTAR PUSTAKA.....	33
	LAMPIRAN.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu.....	11
Tabel 4.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Diskominfo Kalbar Tahun 2023.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	17
---	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertanyaan Wawancara.....	36
Lampiran 2. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 202	38
Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan PSAP NO 02 PP 71 Tahun 2010	41
Lampiran 4. Artikel	43
Lampiran 5. LOA.....	50
Lampiran 6. Hasil Uji Plagiasi.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat yang semakin peduli terhadap good public governance mendorong pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dengan transparan dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, hasil, dan pengelolaan sumber daya publik, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat sebagai pihak yang terpengaruh olehnya. Upaya meningkatkan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan keuangan negara, bisa dilakukan melalui pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang memberikan pedoman untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Seiring dengan itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan peran Pemerintah Daerah dalam mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, dengan mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan keuangan negara harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar seperti efisiensi, transparansi, dan pertanggungjawaban, serta standar akuntansi pemerintah yang dirumuskan oleh komite standar independen dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah setelah mendapat masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan serangkaian prosedur dan elemen yang dirancang untuk menjalankan fungsi akuntansi dalam organisasi pemerintah. SAP didasarkan pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan menggunakan basis akrual untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah. Perubahan ke basis akrual, yang ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010, bertujuan untuk memastikan penyusunan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. Dalam praktiknya, terdapat dua jenis entitas: entitas akuntansi yang mengelola anggaran dan menyajikan laporan keuangan, serta

entitas pelaporan yang wajib menyajikan laporan keuangan dengan tujuan umum, berdasarkan kriteria pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan aset. Laporan keuangan pemerintah adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan mengenai aktivitas, posisi keuangan, dan kinerja keuangan entitas pemerintahan. Laporan ini mencakup berbagai elemen seperti pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana publik. Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang relevan mengenai keadaan keuangan dan semua aktivitas yang terjadi dalam suatu entitas pelaporan selama satu periode tertentu. Laporan keuangan secara utama digunakan untuk menilai nilai dari sumber daya ekonomi yang digunakan untuk menjalankan operasi pemerintahan, mengevaluasi situasi keuangan, mengukur efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menilai kepatuhan terhadap peraturan hukum. Setiap entitas pelaporan bertanggung jawab untuk secara teratur dan terstruktur melaporkan langkah-langkah yang telah diambil dan pencapaian yang telah diraih dalam menjalankan kegiatan mereka selama periode tertentu.

Laporan keuangan pemerintahan terdiri dari beberapa komponen yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Setiap laporan harus disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi salah satu dokumen penting yang menggambarkan sejauh mana penggunaan dana publik telah terealisasi dalam melaksanakan program-program pemerintah. LRA mencakup rincian pendapatan yang diterima, pengeluaran yang dibuat, serta perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan yang telah terealisasi. Informasi dalam LRA digunakan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah. Penyusunan laporan keuangan pemerintahan dengan landasan yang jelas dan konsisten memastikan terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu dinas yang berada di bawah pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, sebagai bagian dari struktur administrasi pemerintahan di tingkat provinsi, juga perlu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana di tingkat provinsi, masyarakat dapat memantau dan menilai efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran tersebut.

Penelitian sebelumnya tentang Standar Akuntansi Pemerintah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Mereka menemukan bahwa Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara menekankan aspek-aspek utama seperti pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan agar penyajiannya lebih rinci. Penelitian serupa menyimpulkan bahwa penerapan Laporan Realisasi Anggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan telah sesuai dengan PSAP No.02. Prosedur yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencakup semua elemen yang diperlukan dalam laporan realisasi anggaran. Elemen-elemen tersebut meliputi penyajian pendapatan yang terealisasi beserta perbandingannya dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam periode tertentu dan rincian pendapatannya, penyajian belanja yang terealisasi beserta perbandingannya dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam periode yang sama dan rincian belanjanya, penyajian transfer anggaran yang terealisasi beserta perbandingannya dengan anggaran transfer yang telah ditetapkan dalam periode tertentu dan rincian transfernya, penyajian surplus/defisit anggaran yang terealisasi beserta perbandingannya dengan anggaran surplus/defisit dan rincian surplus/defisit LRA, serta penyajian pembiayaan anggaran yang terealisasi beserta perbandingannya dengan anggaran pembiayaan yang telah ditetapkan dalam periode yang sama dan rincian pembiayaannya. Dalam penelitian yang sudah dilakukan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian tentang penerapan PSAP No.02 di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat untuk mengetahui

apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun tersebut telah sesuai dengan PSAP No.02 dengan mengangkat judul penelitian: “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Diskominfo Kalbar)”

1.2 Rumusan Masalah

Apakah laporan realisasi anggaran tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan PSAP No.02 tentang laporan realisasi anggaran.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Diharapkan studi ini bisa memberikan tambahan wawasan serta kajian mengenai Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Diskominfo Kalbar).

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan acuan srbagai referensi dan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat mengembangkan kajian yang berkaitan dengan laporan realisasi anggaran.

1.4.2 Kontribusi Praktis

1. Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

Sebagai informasi dan bahan masukan untuk mengulas kembali tentang PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang diatur dalam PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi sumber referensi yang berharga bagi pihak lain yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini juga berperan penting sebagai sarana pembelajaran pribadi bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang penelitian. Melalui penelitian ini, peneliti dapat menggali wawasan yang lebih dalam tentang penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik, sehingga masyarakat lebih memahami bagaimana dana daerah dialokasikan dan digunakan. Dengan demikian, penelitian ini membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan anggaran, yang pada akhirnya dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

1.5 Gambaran Konstektual Penelitian

Gambaran kontekstual dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Adapun penjelasan dari lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Oleh karena itu, bab pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan gambaran kontekstual.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman masalah menyeluruh dalam penelitian. Masalah-masalah tersebut meliputi landasan teori, kajian-kajian empiris, kerangka konseptual, serta pengembangan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan mendeskripsikan data penelitian, analisis data, serta pembahasan tentang hasil analisis berdasarkan teori yang ada.

BAB V Penutup, dalam bab ini menjelaskan kesimpulan yang didapat dari hasil analisis pada bab IV, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan tentang sasaran bagi peneliti berikutnya